



**WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 27 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2023;
 - b. bahwa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas agar perlu memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai;

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
8. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun ;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai;
10. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- b. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dokumen RKPD Tahun 2024; dan
 - b. Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024.
- c. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diamanahkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 pasal 75 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, Rencana Kerja Pemerintah, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD".
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi OPD dalam menyusun Renja OPD Tahun 2024;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2024.

BAB III

KETENTUAN UMUM

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024 antara lain:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD;
- b. OPD menggunakan RKPD Tahun Anggaran 2024 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran OPD dengan DPRD Kota Tanjungbalai

Pasal 5

- (1) OPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota Cq. Bapperida Kota Tanjungbalai paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD yang bersangkutan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 7 Agustus 2023

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

WARIS THOLIB

**Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 7 Agustus 2023**

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2023 NOMOR...27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HERMAN GULTOM, SH
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19810630 200604 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 27 TAHUN 2023
TANGGAL : 07 AGUSTUS 2023
TENTANG : RENCANA KERJA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
YANG MENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024**

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungbalai;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai;
6. Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai;
7. Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
8. Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai;
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tanjungbalai;
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai;
11. Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai;
14. Dinas Sosial Kota Tanjungbalai;
15. Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai;
16. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tanjungbalai;
17. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungbalai;
18. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Tanjungbalai;
19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kota Tanjungbalai;
20. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai;
21. Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai;
22. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai;
23. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai;
24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai;
25. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungbalai;
26. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai;
27. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.T.Mansyur Kota Tanjungbalai;
28. Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai;

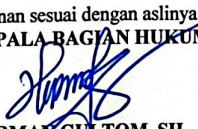
29. Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai;
30. Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
31. Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;
32. Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;
33. Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
34. Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
35. Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

WARIS THOLIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HERMAN GULTOM, SH
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19810630 200604 1 003



PEMERINTAH KOTA
TANJUNGBALAI

**RANCANGAN AKHIR RENCANA
KERJA (RENJA)
TAHUN 2024**

**DINAS PERHUBUNGAN KOTA
TANJUNGBALAI**

**Jln. Jend. Sudirman Km. 7 Telp. (0623) 7590080
Tanjungbalai**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dimana Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini disusun berdasarkan tuntutan umum Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi pemerintah kota Tanjungbalai, Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai maupun bagi masyarakat Kota Tanjungbalai.

Tanjungbalai,

2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TANJUNGBALAI**



**AMRAN SANUSI RAMBE, S.Sos, M.SP
PEMBINA TK.I
Nip. 19641231.198703.1.082**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Renja SKPD.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	19
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	19
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 ...	20
3.3. Program dan Kegiatan	21
BAB IV PENUTUP.....	23

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen rencana tahunan di OPD mutlak harus tersedia sebagai acuan kerja untuk mengaktualisasikan kinerja program dan kegiatan. Penyusunan dokumen rencana tahunan yang disebut rencana kerja tahun OPD disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun rencana yang telah mempertimbangkan hasil kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Renja OPD disusun melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum OPD dan penetapan Renja . Dokumen Renja OPD terbagi atas rancangan Renja OPD definitif yang telah disesuaikan dengan dokumen OPD yang telah disahkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Renja OPD yang disusun selain mengacu pada rancangan awal RKPD dan Renstra OPD, juga mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan renja OPD yang telah diverifikasi oleh Bappeda menjadi bahan penyempurnaan penyusunan rancangan akhir RKPD yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai tahun 2024 disusun dalam rangka penyediaan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai satu tahun ke depan yang

berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja serta dana indikatif dan prakiraan maju 2025.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN.Tahun 2009 Nomor 96, TLN.Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan Perwakilan rakyat daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintahan daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan rencana kerja pemerintahan daerah tahun 2020
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Tanjungbalai tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun anggaran 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dokumen rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai tahun 2024.

2. Sebagai pedoman Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas pada tahun 2024.
3. Untuk memberikan arahan bagi sinkronisasi program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024.

1.4. Sistematika Renja SKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan Renja-SKPD

BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V : PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Pada tahun 2022 penetapan program dan kegiatan mengacu pada rancangan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 dimana penetapan visi, misi tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut:

Visi Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2026 adalah "***Dinas Perhubungan yang melayani dan Memudahkan Mobilisasi***". Agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Renstra, maka perlu dijelaskan makna dari kalimat visi tersebut diatas, sebagai berikut :

Melayani mobilitas, diindikasikan oleh penyelenggara transportasi yang aman, cepat, selamat, nyaman, terpelihara, mencukupi kebutuhan, serta ramah lingkungan dan menjangkau seluruh wilayah Kota Tanjungbalai;

Transportasi mempunyai dua fungsi utama yaitu mobilitas dan aksesibilitas. Fungsi mobilitas dilihat dari pembangunan dapat mempercepat proses pembangunan, sedangkan fungsi aksesibilitas dalam pembangunan terwujud dalam hal pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan sosial ekonomi. Permintaan Transportasi merupakan turunan dari kebutuhan aktivitas sosial ekonomi.

Dengan pengertian fungsi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai ingin menjadi pelayan yang memudahkan masyarakat untuk memudahkan mobilisasi pengguna angkutan dan distribusi barang/jasa dan memudahkan komunikasi di dalam wilayah Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan uraian dan panduan di atas maka rumusan **Misi** Dinas Perhubungan Tahun 2016 sampai Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pelayanan transportasi yang aman, cepat, selamat, nyaman, terpelihara, mencukupi kebutuhan, serta ramah lingkungan dan menjangkau seluruh wilayah Kota Tanjungbalai.

Dalam upaya mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas, upaya yang dilakukan tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan

dan keamanan, namun peningkatan kualitas SDM transportasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, yang merupakan sistem dalam pelayanan.

2. Membangun prasarana dan sarana serta fasilitas perhubungan yang berkualitas;

Dalam upaya menghilangkan keteringgalan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan sejalan dengan dinamika perkembangan permintaan transportasi . dalam penyediaan prasarana senantiasa berpedoman pada rencana struktur tata ruang.

3. Membangun perwujudan transportasi perkotaan yang berkualitas, efisien dan berkelanjutan dalam pelayanan.

Dalam upaya menurunkan tingkat kemacetan lalu lintas dan polusi udara di perkotaan peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititik beratkan kepada kebijakan dan akan diarahkan pada keterpaduan penanganan prasarana dan sarana serta penerapan skema manajemen lalu lintas (*Traffic Management*)

4. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia, meningkatkan kemampuan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas serta pembinaan Teknis tentang pelayanan Operasional Transportasi.

Berdasarkan pernyataan misi diatas maka tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan adalah "Mewujudkan keamanan dan keselamatan bertransportasi"

Dan perumusan sasarannya adalah masing-masing sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas

Dengan Target indikator tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Pemasangan Rambu-rambu, dengan target 15%
- b. Rasio angka kecelakaan lalu lintas menurun, dengan target 60%
- c. Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan, dengan target 0,50 v/c
- d. Jumlah titik rawan kemacetan, dengan target 4 titik

2. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan;

Dengan target indikator tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Kapasitas angkutan umum, dengan target 0,50

Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi ada 2 (dua) sasaran yang harus dicapai dalam tahun 2022. Dan semua sasaran tersebut telah dilaksanakan dengan tingkat realisasi capaian yang berbeda-beda, seperti tabel dibawah ini:

Tabel.III.1 Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas	- Pemasangan rambu-rambu	15%	10%	66%
		- Rasio Angka Kecelakaan Lalu Lintas Menurun	60%	13%	21%
		- Rasio Panjang Jalan Perjumlah kendaraan	0,50	0,45	90%
		- Jumlah Titik Rawan Kemacetan	4 Titik	5 titik	80%
2	Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan	- Kapasitas angkutan umum	0,50	0,40	80%

Dari Tabel capaian indikator diatas, dapat dilihat capaian realisasi dari sasaran strategis, dimana dari dua sasaran yang telah ditetapkan dalam Tahun 2022 ada satu satu sasaran kinerja yang indikator kinerjanya belum maksimal yaitu pada indikator pemasangan rambu-rambu yang hanya terealisasi 10 % dan rasio angka kecelakaan lalu lintas yang hanya terealisasi 13 %. Berikut ini permasalahan yang mengakibatkan tidak tercapinya realisasi dari target capaian indikator kinerja dinas perhubungan:

a. Pemasangan rambu-rambu.

Pada indikator ini tingkat realisasi capaian hanya 10% dari target yang ditentukan sebesar 15% (206 unit), atau terealisasi sebanyak 15 unit, hal ini diakibatkan kurangnya anggaran Dinas Perhubungan, yang mengakibatkan hanya menargetkan pemasangan rambu-rambu ditahun 2022 sebanyak 18 unit, kedepan dinas perhubungan akan meningkatkan fasilitas keselamatan jalan, seperti pengadaan perlengkapan jalan dan

juga merehabilitas terhadap perlengkapan jalan yang sudah ada yang dalam kondisi rusak.

b. Rasio angka kecelakaan lalu lintas menurun.

Pada indikator ini tingkat realisasinya hanya 13%, yang mana menurut data dari kepolisian Kota Tanjungbalai, angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 sebanyak 57 angka kecelakaan, sedangkan tahun 2022 angka kecelakaan sebanyak 50 angka kecelakaan. Hal ini diakibatkan tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas masih rendah. Disamping itu banyaknya sarana prasarana yang belum memadai.

c. Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan.

Pada indikator ini realisasi yang dicapai 0,45 v/c dari target 0,50 v/c atau terealisasi 90 %, hal di akibat pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan pembangunan jalan, mengakibatkan volume lalu lintas bertambah besar terutama pada waktu pagi hari dan sore hari.

d. Jumlah rawan kemacetan

Pada indikator ini realisasinya tercapai 5 titik dari target 4 titik yang ditentukan atau pencapaiannya 80 %, hal ini diakibatkan pengembangan tata guna lahan tidak menyediakan fasilitas tempat parkir, sehingga terjadi kemacetan terutama pada titik-titik yang jalanya terletak pasar tempat berjualan.

e. Kapasitas angkutan umum

Pada indikator ini dari target 0,50 yang ditentukan terealisasi 0,40, atau dengan kata lain dari target kapasitas penumpang terisi 50% yang telah ditentukan, terealisasi kapasitas penumpang 40%, hal ini dikibatkan sarana dan prasarana angkutan umum yang tidak memadai, sehingga masyarakat enggan menggunakan angkutan umum.

Dari sisi realisasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2022 Dinas Perhubungan memiliki anggaran sebesar **Rp. 5.628.869.655-** dengan realisasi sebesar **Rp. 5.425.954.253-** dan nilai capaian keberhasilan sebesar **95,92%**. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2022 diperuntukkan bagi belanja urusan wajib bidang perhubungan.

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan di Dinas Perhubungan sampai akhir tahun kegiatan tahun 2022 sudah berhasil. Beberapa output kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Perhubungan yang dicapai pada tahun 2022 diantaranya adalah:

1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat
2. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
3. Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Terlaksananya jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5. Tersedianya Alat Tulis Kantor
6. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
7. Terlaksananya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
9. Tersedianya Makanan Dan Minuman
10. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
11. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
12. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor
13. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
14. Tersedianya laporan Keuangan Akhir Tahun
15. Tersedianya Renja SKPD
16. Tersedianya pemasangan rambu-rambu lalu lintas
17. Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota

Pelaksanaan tugas-tugas layanan di Dinas Perhubungan yang utamanya adalah pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya, koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan juga telah terlaksana dengan baik. Selanjutnya pada tahun 2022 ini pencapaian rencana kerja ini masih difokuskan kepada sasaran peningkatan kualitas SDM aparatur Dinas Perhubungan, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan pelayanan angkutan, peningkatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas, peningkatan pelayanan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor, peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung fasilitasi layanan di Dinas Perhubungan juga mewujudkan efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur.

2.1.1. Realisasi Kinerja dan Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2022

Realisasi kinerja dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai yang telah terealisasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2022**

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	Capaian (%)
1	3	4	8	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.315.909.655	5.114.264.253	96,21
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.800.000	2.800.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.200.000	2.200.000	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.538.266.847	3.371.742.717	95,29
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.535.266.847	3.368.742.717	95,29
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.428.048	177.395.223	99,98
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.029.000	4.029.000	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.713.748	26.681.600	99,88
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	10.000.000	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.085.300	34.085.300	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.360.000	3.360.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.240.000	99.239.623	99,99

4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.364.524.760	1.329.820.203	97,46
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.804.280	30.074.003	84,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	9.989.000	99,89
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.316.220.480	1.287.257.200	97,80
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.690.000	228.288.110	99,82
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.170.000	39.164.000	99,98
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak , dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.520.000	184.124.110	99,79
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	5.000.000	100,00
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	340.617.255	311.708.000	91,51
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	27.657.255	22.930.000	82,91
	Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	27.657.255	22.930.000	82,91
2	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	312.960.000	288.778.000	92,27
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	312.960.000	288.778.000	92,27
JUMLAH		5.656.526.910	5.425.954.253	95,92

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2022

Pada realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas perhubungan tahun 2022 semua terealisasi dengan persentase realisasi rata-rata diatas 80 %, hal ini diakibatkan pekerjaan yang dilakukan lebih banyak bersifat rutin, sehingga pekerjaan teknis yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator dinas perhubungan belum tercapai, seperti pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan masih minim dalam hal penganggaran.

1. Faktor-Faktor Penyebab Terpenuhinya Target Kinerja Keluaran Program/Kegiatan

Faktor- faktor penyebab dari beberapa program/kegiatan yang memenuhi capaian target umumnya disebabkan karena manajemen kepemimpinan di Dinas Perhubungan yang mulai mengarah kepada pencapaian kinerja selain didukung oleh SDM aparatur yang memadai, sarana dan prasarana yang mencukupi dan kebijakan-kebijakan yang mendukung proses pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu.

2. Realisasi Program/Kegiatan Yang telah Memenuhi Target Kinerja Keluaran Yang Direncanakan.

Secara teknis Hampir semua program kegiatan yang memenuhi target dari anggaran yang telah diberikan dengan realisasi keseluruhan sebesar 95,92 % .

3. Faktor-Faktor Penyebab Realisasi Melebihi Target Kinerja Keluaran Program/Kegiatan

Selama tahun 2022 ini belum ada program kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja keluaran. Sehingga faktor-faktor yang turut mendorong kepada pencapaian realisasi yang melebihi tidak ditemukan. Realisasi setiap program kegiatan memenuhi target rencana.

4. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra SKPD

Implikasi yang timbul akibat capaian Program dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai secara umum tidak mempengaruhi pada kegiatan yang telah dilaksanakan, dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, jadi dalam segi Perencanaan tidak berpengaruh secara langsung hal itu dapat kita lihat dari realisasi penyerapan Anggaran yang mencapai 95,92 persen namun hal ini tidak menjadi ukuran sebab kinerja tidak hanya dapat diukur melalui realisasi keuangan, namun dapat juga diukur dari indikator hasil (*outcome*) yang telah dicapai.

5. Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut

Untuk mengatasi faktor – faktor tersebut Dinas Perhubungan tetap terus melakukan kebijakan yang bertujuan agar capaian Program akan terpenuhi, dan pada prinsipnya kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang mengarah kepada sektor transportasi yang langsung dinikmati oleh masyarakat arah kebijakan tersebut adalah meningkatkan kinerja keselamatan dan pelayanan, sehingga pelayanan jasa transportasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dan memberikan informasi yang handal kepada masyarakat upaya tersebut antara lain meliputi :

- a) Meningkatkan keselamatan operasional baik sarana maupun prasarana transportasi;
- b) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi baik dikawasan perkotaan maupun daerah belum berkembang;
- c) Penyediaan pelayanan jasa transportasi yang berkualitas;

Arah kebijakan masing-masing sub sektor adalah sebagai berikut:

A. Bidang Transportasi Darat

Arah kebijakan transportasi darat meliputi:

- a) Peningkatan kondisi pelayanan angkutan umum jalan raya;
- b) Meningkatkan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagai pendukung moda transportasi lainnya;
- c) Melanjutkan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan angkutan perintis untuk Masyarakat;
- d) Meningkatkan keselamatan transportasi darat secara komprehensif dan terpadu;
- e) Pengembangan transportasi darat berkelanjutan;
- f) Pemaduan pengembangan kawasan dengan sistem transportasi kota.

B. Bidang Pelayanan dan angkutan sungai dan penyeberangan

Arah kebijakan pembangunan transportasi laut difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, pembangunan sistem yang memperlancar dan mempermudah pelayanan serta peningkatan SDM dan pengembangan institusi sesuai amanat UU No. 17/2008 tentang Pelayanan. Untuk

menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut, dilakukan upaya - upaya sebagai berikut:

- a) Membangun dan mengembangkan pelabuhan;
- b) Membangun dan meningkatkan kualitas terminal penumpang;
- c) Membangun sistem pelayanan dan Sosialisasi kepada Pengusaha Pelayaran;
- d) Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan integritas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;

C. Penunjang Transportasi

Arah kebijakan penunjang transportasi di lingkungan Dinas Perhubungan meliputi:

- a) Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan penyiapan tugas pokok dan fungsi;
- b) Memberikan kesempatan yang luas kepada PNS di lingkungan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kompetensinya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan dan pembangunan di sektor transportasi;
- c) Reformasi dan restrukturisasi organisasi yang mampu mengantisipasi perkembangan sektor transportasi guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- d) Perencanaan dan penelaahan peraturan di bidang transportasi baik Darat, Pelayaran dan ASDP ;
- e) Mewujudkan Pelayanan Umum yang Optimal yang antara lain meliputi:
 - Terwujudnya pelayanan dan tertib administrasi yang sesuai dengan sistem dan prosedur;
 - Terselenggaranya pelayanan Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan sarana dan prasarana dengan baik;
 - Terwujudnya pelayanan administrasi pembiayaan yang efektif dan efisien;
- f) Mengembangkan kerja sama dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran sehingga anggaran dapat terserap sesuai dengan rencana dan sesuai peraturan berlaku;

- g) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang ada;
- h) Penatausahaan, pembukuan, verifikasi dan pertanggung jawaban serta laporan keuangan Dinas Perhubungan ;
- i) Pengelola Anggaran yang berkualitas;

Secara keseluruhan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 dirangkum dalam Tabel T-C.29.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Kota Tanjungbalai dan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai mengemban tugas membantu Walikota Tanjungbalai dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan dengan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan
2. Pelaksanaan pelayanan umum bidang perhubungan
3. Pengelolaan urusan ketatausahaan
4. Pemberian dukungan dan koordinasi dengan instansi pelayanan perizinan
5. Penyusunan rencana kebijakan umum, operasional dan evaluasi dibidang perhubungan
6. Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perhubungan darat, laut, dan ASDP
7. Pengendalian administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga dinas perhubungan
8. Penyelenggaraan unit pelaksana teknis di lingkungan dinas
9. Pelaksanaan pengaman dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daeerah
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya

11. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota sesuai standar yang ditetapkan

Keseluruhan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan yang akan direncanakan Tahun 2021-2026 serta proyeksi untuk tahun 2021-2026 dirangkum pada Tabel T-C.30.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Isu-isu strategis adalah sesuatu yang menjadi fokus utama perhatian dari Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai yaitu:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur Dinas Perhubungan sesuai kompetensi dan kebutuhan dalam mendukung Tata Kelola dan Pemerintahan yang Baik (Good Governance);
2. Penegakan hukum terhadap pelanggran transportasi khususnya angkutan orang dan barang yang tidak memenuhi standard sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Berkembangnya Transportasi yang berbasis teknologi aplikasi yang belum didukung dengan aturan
4. Lalu lintas yang berkeselamatan dalam arti aman, nyaman, efisien dan efektif
5. Peningkatan pengawasan, pengelolaan dan pelayanan keselamatan berlalu lintas di jalan raya ;

Untuk menindak lanjuti isu-isu strategis tersebut maka Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai perlu mengambil langkah-langkah berikut ini:

1. Melakukan suatu perencanaan yang matang untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai.
2. Membuat suatu usulan kegiatan yang sejalan dengan program – program dari Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Pusat.
3. Melakukan koordinasi kepada Pemerintah Propinsi untuk mengusulkan anggaran yang dibiayai oleh APBN dan APBD Propinsi.

4. Melaksanakan program – program yang berskala prioritas agar pelayanan jasa transportasi akan terwujud.
5. Membuat suatu peraturan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai.
6. Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap SDM dibidang perhubungan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD selain menguraikan tentang hasil RKPD tahun lalu juga harus memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan. Dalam hal penyusunan program dan kegiatan di Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai tahun 2024 yang tercantum dalam rancangan awal RKPD terdapat sedikit perbedaan dengan analisis kebutuhan. Perbedaan ini terletak pada pagu indikatif dengan kebutuhan yang telah ditetapkan yang biasanya dikarenakan keterbatasan anggaran, meskipun demikian hal ini diupayakan tidak mengganggu esensi secara substansi terhadap rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu perbedaan bisa saja terjadi akibat penyesuaian dengan kebijakan-kebijakan baru oleh Pemerintah Pusat dan atau oleh Pemerintah Provinsi yang mengharuskan sebuah program/kegiatan baru ditampung sementara pada saat rancangan awal disusun informasi belum diterima.

Review program/kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024 terhadap rancangan awal RKPD 2024 disajikan pada **Tabel T-C.31**.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat secara teknis yang terkait dengan peran dan fungsi pelayanan di Dinas Perhubungan sudah tertampung dalam dokumen Renstra 2021 - 2026, namun tidak semua dapat terrealisasi dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah menyebabkan usulan – usulan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, salah satu Usulan dari masyarakat adalah agar meningkatkan pelayanan dibidang transportasi darat yaitu rehabilitasi Terminal dan juga pengujian kendaraan bermotor.

Karena Terminal merupakan salah satu pelayanan yang harus diberikan Pemerintah Daerah khususnya pada Dinas Perhubungan dan merupakan skala prioritas yang harus segera dilaksanakan namun sampai saat ini masih belum dapat dilaksanakan, namun demikian Dinas Perhubungan berupaya mengajukan anggaran Rehabilitas Terminal kepada Dinas Perhubungan Provinsi agar dapat dianggarkan karna sejak tahun 2018 kewenangan terminal sijambi sudah berada di Dinas Perhubungan Provinsi. Demikian juga dengan pengujian kendaraan bermotor, tidak dapat melakukan pengujian di kota Tanjungbalai karena tidak adanya alat pengujian kendaraan bermotor sehingga Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai mengarahkan masyarakat yang mau menguji ke Kabupaten Asahan.

Selain usulan tersebut diatas masyarakat hanya memberikan masukan – masukan yang bersifat untuk meningkatkan pelayanan secara langsung seperti pengaturan dan pengendalian arus lalu lintas yang bersifat insidental dan itu merupakan salah satu fungsi pelayanan yang dapat dilaksanakan secara langsung oleh Dinas Perhubungan.

BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan terkait dengan perencanaan di OPD harus mengacu pada kebijakan di tingkat Pemerintah Kota, Provinsi dan Nasional yang tercantum di dalam dokumen-dokumen perencanaan pada masing-masing tingkatan pemerintahan tersebut. Telaahan terhadap kebijakan nasional dapat dilihat dari dokumen Rencana Jangka Panjang Departemen Perhubungan tahun 2005-2025 demikian juga dengan dengan kebijakan Provinsi dapat dilihat dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun yang sama. Telaahan tujuan dan sasaran di Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai terkait dengan kebijakan Nasional dan Provinsi adalah yang terkait dengan urusan bidang Pembangunan dan PengembanganTransportasi baik Darat, Pelayaran dan ASDP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan nasional terkait bidang Pembangunan dan Pengembangan Transportasi adalah mewujudkan Sistem Transportasi Nasional dalam seluruh hirarkinya sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan transportasi yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan transportasi bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
2. Kebijakan Provinsi terkait bidang perencanaan adalah mewujudkan peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya perencana pembangunan daerah; Mewujudkan sarana prasarana dan jaringan perencanaan (*planning-network*) yang memadai; Menciptakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah secara maksimal dan mewujudkan monitoring pelaksanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang efektif dan efisien.
3. Kebijakan Kota Tanjungbalai terkait bidang Transportasi adalah:
Dinas Perhubungan yang melayani dan Memudahkan Mobilisasi

Dari ketiga poin di atas terlihat bahwa kebijakan yang tertuang di dalam sasaran Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai telah selaras dengan kebijakan nasional dan Provinsi di bidang pembangunan dan Pengembangan Transportasi. Dengan kata lain bahwa peran dan fungsi layanan di Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai telah mendukung kebijakan nasional dan Provinsi di bidang pembangunan dan Pengembangan Transportasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan setiap tahunnya mengacu kepada tujuan dan sasaran pada rancangan Renstra Dinas Perhubungan untuk menjelaskan capaian sasaran target kinerja setiap tahunnya. Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa terdapat 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran pada rancangan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 yakni:

“Mewujudkan keamanan dan keselamatan bertransportasi”

Dan perumusan sasarannya adalah masing-masing sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan;

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran di atas, berikut diuraikan beberapa sasaran target kinerja untuk tahun 2024:

1. Transportasi Darat

Sasaran pembangunan transportasi darat adalah :

- a. Penurunan kejadian kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan
- b. Peningkatan disiplin pengoperasian angkutan di jalan raya
- c. Peningkatan pelayanan angkutan
- d. Peningkatan sarana dan prasarana LLAJ
- e. Peningkatan jumlah prasarana dan sarana keselamatan LLAJ
- f. Pemeliharaan fasilitas LLAJ
- h. Peningkatan keselamatan Pelayaran dan ASDP;

- i. Peningkatan jumlah prasarana Dermaga/Tambatan kapal untuk meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan
- j. Peningkatan fasilitas Dermaga/Pelabuhan

2. Keselamatan Transportasi

Sasaran pembangunan keselamatan transportasi adalah terwujudnya :

- a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi jalan dan jalur pelayaran sungai, kualitas lingkungan, alur transportasi serta pemeliharaan alur ASDP untuk dapat mewujudkan keselamatan transportasi darat;
- b. Peningkatan sistem data kecelakaan LLAJ dan ASDP yang akurat, kredibel, dan up to date;
- c. Peningkatan peran serta masyarakat, swasta dan dunia pendidikan dalam mewujudkan keselamatan transportasi darat;
- d. Peningkatan disiplin dan kesadaran pengguna jalan baik pengemudi kendaraan bermotor dan tidak bermotor, pengemudi , serta pejalan kaki;
- e. Peningkatan kualitas SDM dalam perencanaan dan penyelenggaraan keselamatan transportasi darat;
- f. Penyelenggaraan angkutan orang, barang baik angkutan jalan maupun angkutan sungai dan penyeberangan yang aman, nyaman dan selamat;
- g. Penurunan jumlah dan tingkat fatalitas dan kecelakaan transportasi darat.

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Rancangan awal Rencana kerja tahun 2024 Dinas Perhubungan mengusulkan anggaran APBD sebesar Rp. 13.375.469.638,- dan Pada penetapan rancangan akhir Rencana Kerja tahun 2024 ditetapkan pagu sebesar Rp. 7.485.387.597,- dengan dengan melaksanakan 3 (Tiga) program dan 16 (Enam Belas) kegiatan, yang mana anggaran ini sudah termasuk gaji ASN dinas perhubungan Kota Tanjungbalai. Selain itu terdapat juga kegiatan prioritas Dinas Perhubungan berupa kegiatan pengadaan sarana dan prasarana, penyediaan perlengkapan jalan berupa pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan juga rehabilitas dan pemeliharaan perlengkapan jalan.dan Fokus

kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah dengan melakukan pengendalian arus lalu lintas di inti kota dengan menempatkan personil dinas perhubungan di titik-titik kemacetan arus lalu lintas.

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan untuk tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 di rangkum di dalam Tabel T-C.33.

BAB IV PENUTUP

Secara umum Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai merupakan dasar pedoman acuan kerja untuk mengaktualisasikan kinerja program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang telah mempertimbangkan hasil kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 ini telah memberikan kerangka utama dalam pengembangan transportasi di Tanjungbalai. Pengembangan yang tercakup dalam RENJA untuk menjabarkan kegiatan pada 1 (satu) tahun kedepan sesuai Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai agar program dan kegiatan yang telah direncanakan lebih efektif dan efisien serta dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Dan untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam RENJA Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kota Tanjungbalai serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami.

Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Semoga Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungbalai, 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TANJUNGBALAI

AMRAN SANUSI RAMBE, S.Sos, M.SP
PEMBINA TK I
NIP. 19730926.199402.1.003

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2022
Kota Tanjungbalai

NAMA OPD : DINAS PERHUBUNGAN										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program dalam Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan awal Renstra Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	5 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	1 Lap	100%
	Administrasi Keuangan perangkat daerah									
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	gaji ASN	35 Asn	35 Asn	35 Asn	35 Asn	100%	35 Asn	35 Asn	100%
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	5 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	1 Lap	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	1 Lap	100%
	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah									
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200 stel	0 stel	- stel	- stel	0%	- stel	- stel	0%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimtek	5 kali	0 kali	- kali	- kali	0%	- kali	- kali	0%
	Administrasi Umum perangkat daerah									
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Pak	1 pak	1 pak	1 pak	100%	1 pak	1 pak	100%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Pak	1 pak	1 pak	1 pak	100%	1 pak	1 pak	100%
	Penyediaan bahan logistik kantor	makan minum	5 pak	1 pak	1 pak	1 pak	100%	1 pak	1 pak	100%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	5 pak	1 pak	1 pak	1 pak	100%	1 pak	1 pak	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/majalah/buku/bahan bacaan lainnya	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas	320 lap	50 lap	64 lap	64 lap	100%	75 lap	75 lap	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	0 unit	- unit	- unit	0%	- unit	- unit	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	25 unit	0 unit	- unit	- unit	0%	7 unit	7 unit	100%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luasan gedung yang dibangun	1 unit	0 unit	- unit	- unit	0%	- unit	- unit	0%
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah									
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai	1.250 lap	250 lap	250 lap	250 lap	100%	250 lap	250 lap	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tagihan air, listrik, internet dll	120 lap	24 lap	24 lap	24 lap	100%	24 lap	24 lap	100%
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 lap	5 lap	10 lap	10 lap	100%	10 lap	10 lap	100%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah TKS	240 lap	48 lap	48 lap	48 lap	100%	48 lap	48 lap	100%
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah									
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan	78 unit	13 unit	13 unit	13 unit	100%	18 unit	18 unit	100%
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	25 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	100%
	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)									
	Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
	Pembangunan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan yang terbangun	4 unit	0 unit	- unit	- unit	0%	- unit	- unit	0%
	Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia	195 unit	- unit	18 unit	15 unit	83%	20 unit	20 unit	100%
	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah prasarana jalan yang terpelihara	1 unit	- unit	0 unit	- unit	0%	0 unit	- unit	0%
	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terpelihara	13 unit	0 unit	- unit	- unit	0%	- unit	- unit	0%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengujian berkala kendaraan bermotor									
	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Tersedianya DED dan sarana prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	1 unit	- unit	0 unit	- unit	0%	0 unit	- unit	0%
	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah PNS yang terlatih	2 org	- org	0 org	0 org	0%	0 org	0 org	0%
	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota									
	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pengawasan	129 lap	29 lap	17 lap	17 lap	100%	20 lap	20 lap	100%
	Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota									
	Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen data base dinas perhubungan kota Tanjungbalai	1 dok	0 dok	- dok	- dok	0%	- dok	- dok	0%
	Program pengelolaan pelayaran									
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota									
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	72 kali	0 kali	- kali	- kali	0%	- kali	- kali	0%
	- Pengawasan angkutan sungai									

Tanjungbalai, 2023

Kepala Dinas Perhubungan

KORPRI TAMBAHAN

AMIR SANUSI RAMBE S Sos M SP

PEMBINA TK

NIP 19730826 195402 1 003

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGBALAI

No.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
		2021 (3)		2022 (4)	2023 (5)	2024 (6)	2025 (7)	2026 (8)	2027 (9)	2022 (9)	2023 (10)	2023 (10)	2023 (11)	
(1)	(2)													
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	590.702		610.702	635.702	665.702	695.702	730.702		461.084				
2	Rasio ljin trayek	1 : 1600		-	-	-	-	1 : 1300		1 : 1600				
3	Jumlah Pelabuhan Lau/Terminal Bis	6		-	-	-	-	1		-				
4	Persentase layanan angkutan darat	10%		20%	25%	30%	40%	50%		18%				
5	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	86%		80%	70%	60%	50%	40%		0%				
6	Pemasangan Rambu-Rambu	10%		15%	35%	55%	75%	100%		10%				
7	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0.45 v/c		0.45 v/c	0.45 v/c	0.47 v/c	0.50 v/c	0.50 v/c		0.45 v/c				
8	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum													
9	* Orang	590.702		610.702	635.702	665.702	695.702	730.702		461.084				
	* Barang	106.879 ton		1.000 ton	1.500 ton	2.000 ton	2.500 ton	3.000 ton		809 ton				
	Jumlah orang/barang melalui dermaga/terminal per tahun													
	* Orang	649.772		20.000	25.000	30.000	30.000	35.000		20.644				
10	* Barang	106.879 ton		107.879 ton	109.379 ton	111.379 ton	113.879 ton	116.879 ton		121.951 ton				
	Rasio angka kecelakaan lalu lintas menurun	50%		60%	70%	80%	90%	100%		13%				
11	Jumlah Rawan kemacetan	5 titik		4 titik	3 titik	2 titik	1 titik	0 titik		5 titik				

Tanjungbalai, 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Tanjungbalai



AMKAS SANUSI RAMBE, S.Sos, M.SP
PEMBINA TK
NIR.19730926.198402.1.003
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGBALAI

Tabel T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPALAI

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dishub			7.575.469.638	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dishub			7.575.469.638	
2.15.01.2.01	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000	
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dishub	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	1 dok	2.800.000	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dishub	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	1 dok	2.800.000	
	06 Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dishub	Jumlah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 lap	2.200.000	06 Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dishub	Jumlah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 lap	2.200.000	
2.15.01.2.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.803.000.000	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.803.000.000	
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dishub	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 org/bli	3.800.000.000	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dishub	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 org/bli	3.800.000.000	
	05 Koordinasi dan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Dishub	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun skpd	1 lap	3.000.000	05 Koordinasi dan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Dishub	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun skpd	1 lap	3.000.000	
2.15.01.2.03	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.000.000	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.15.01.2.05	01 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dishub	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1lap	2.000.000	01 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dishub	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1lap	2.000.000	
	4 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah				140.000.000	4 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah				140.000.000	
	02 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut Kelengkapannya	Dishub	Jumlah Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	110.000.000	02 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut Kelengkapannya	Dishub	Jumlah Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	110.000.000	
	09 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dishub	Jumlah orang yang mengikuti bimtek Implementasi peraturan perundang-undangan	2 org	30.000.000	09 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dishub	Jumlah orang yang mengikuti bimtek Implementasi peraturan perundang-undangan	2 org	30.000.000	
	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah				384.000.000	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah				384.000.000	
2.15.01.2.06	01 Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dishub	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	4.000.000	01 Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dishub	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	4.000.000	
	02 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dishub	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	110.000.000	02 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dishub	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	110.000.000	
	04 Penyediaan bahan logistik kantor	Dishub	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	15.000.000	04 Penyediaan bahan logistik kantor	Dishub	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	15.000.000	
	05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dishub	Jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	50.000.000	05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dishub	Jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	50.000.000	
	06 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dishub	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dok	5.000.000	06 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dishub	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dok	5.000.000	
	09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dishub	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	75 lap	200.000.000	09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dishub	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	75 lap	200.000.000	

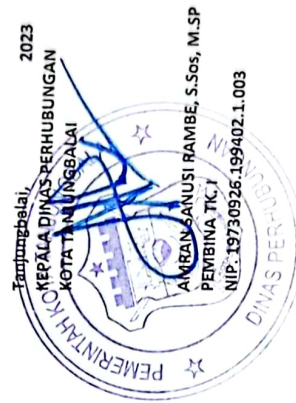
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.15.01.2.07	6 Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				2.150.000.000	6 Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				2.150.000.000	
	01 Pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Dishub	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	400.000.000	01 Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Dishub	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	400.000.000	
	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dishub	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 unit	500.000.000	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dishub	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 unit	500.000.000	
	03 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dishub	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 unit	50.000.000	03 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dishub	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 unit	50.000.000	
	04 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dishub	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya disediakan	2 unit	1.200.000.000	04 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dishub	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya disediakan	2 unit	1.200.000.000	
2.15.01.2.08	7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				832.299.638	7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				832.299.638	
	01 Penyediaan jasa surat menyurat	Dishub	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	250 lap	2.500.000	01 Penyediaan jasa surat menyurat	Dishub	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	250 lap	2.500.000	
	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dishub	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 lap	39.799.638	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dishub	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 lap	39.799.638	
	03 Penyediaan jasa peralatan kerja dan perlengkapan kantor	Dishub	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 lap	50.000.000	03 Penyediaan jasa peralatan kerja dan perlengkapan kantor	Dishub	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 lap	50.000.000	
	04 Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Dishub	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 lap	740.000.000	04 Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Dishub	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 lap	740.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.15.01.2.09	8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				259.170.000	8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				259.170.000	
	01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Dishub	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	39.170.000	01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Dishub	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	39.170.000	
	02 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dishub	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 unit	215.000.000	02 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dishub	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 unit	215.000.000	
	06 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Dishub	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	5.000.000	06 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Dishub	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	5.000.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dishub			5.320.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dishub			5.320.000.000	
2.15.02.2.02	1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				1.550.000.000	1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				1.550.000.000	
	01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah prasarana jalan di jalan kab/kota yang terbangun	2 unit	200.000.000	01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah prasarana jalan di jalan kab/kota yang terbangun	2 unit	200.000.000	
	02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah perlengkapan jalan di jalan kab/kota yang tersedia	301 unit	650.000.000	02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah perlengkapan jalan di jalan kab/kota yang tersedia	301 unit	650.000.000	
	03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dishub	Jumlah prasarana jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	7 unit	100.000.000	03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dishub	Jumlah prasarana jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	7 unit	100.000.000	
	04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dishub	Jumlah perlengkapan jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	4 unit	600.000.000	04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dishub	Jumlah perlengkapan jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	4 unit	600.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.15.02.2.03	3 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				1.500.000.000	3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			1.500.000.000	
	02 Pembangunan gedung terminal	Dishub	Jumlah gedung terminal yang terbangun	1 unit	1.000.000.000	02	Pembangunan gedung terminal	Dishub	Jumlah gedung terminal yang terbangun	1 unit	1.000.000.000
	03 Pengembangan sarana dan prasarana terminal	Dishub	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dilakukan pengembangan	1 unit	300.000.000	03	Pengembangan sarana dan prasarana terminal	Dishub	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dilakukan pengembangan	1 unit	300.000.000
	04 Rehabilitas dan pemeliharaan terminal(fasilitas utama dan pendukung)	Dishub	Jumlah terminal yang terpelihara	1 unit	200.000.000	04	Rehabilitas dan pemeliharaan terminal(fasilitas utama dan pendukung)	Dishub	Jumlah terminal yang terpelihara	1 unit	200.000.000
2.15.02.2.05	4 Pengujian berkala kendaraan bermotor				1.530.000.000	4	Pengujian berkala kendaraan bermotor			1.530.000.000	
	01 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Dishub	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	1 unit	1.500.000.000	01	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Dishub	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	1 unit	1.500.000.000
	02 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	Dishub	Jumlah sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan motor yang ditingkatkan kapasitasnya	2 org	30.000.000	02	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	Dishub	Jumlah sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan motor yang ditingkatkan kapasitasnya	2 org	30.000.000
2.15.02.2.06	5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				670.000.000	5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			670.000.000	
	04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kota					04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kota				
	- Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Dishub	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota	10 lap	470.000.000		- Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Dishub	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota	10 lap	470.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	05 Forum lalu lintas dan angkutan jalan kab/kota	Dishub	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kab/kota	2 lap	200.000.000	05 Forum lalu lintas dan angkutan jalan kab/kota	Dishub	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kab/kota	2 lap	200.000.000	
2.15.02.2	6 Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota				20.000.000	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota				20.000.000	
	02 Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1(satu) kab/kota	Dishub	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1(satu) kab/kota	1 lap	20.000.000	02 Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1(satu) kab/kota	Dishub	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1(satu) kab/kota	1 lap	20.000.000	
2.15.02.2.11	7 Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota				50.000.000	Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota				50.000.000	
	01 Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1(satu) daerah kab/kota	1 dok	50.000.000	01 Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1(satu) daerah kab/kota	1 dok	50.000.000	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dishub			480.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dishub			480.000.000	
2.15.03.2.07	1 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000	1 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000	
	02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kab/kota	4 lap	20.000.000	02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kab/kota	4 lap	20.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.15.03.2.13	2 Pembangunan dan pemberian izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau				460.000.000	2 Pembangunan dan pemberian izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau				460.000.000	
	04 Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Dishub	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	1 lap	10.000.000	04 Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Dishub	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	1 lap	10.000.000	
	05 Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau	Dishub	Jumlah fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau yang tersedia	10 unit	150.000.000	05 Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau	Dishub	Jumlah fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau yang tersedia	10 unit	150.000.000	
	06 Pembangunan dermaga sungai dan danau	Dishub	Jumlah dermaga sungai dan danau yang dibangun	1 unit	300.000.000	06 Pembangunan dermaga sungai dan danau	Dishub	Jumlah dermaga sungai dan danau yang dibangun	1 unit	300.000.000	
	TOTAL				13.375.469.638	TOTAL				13.375.469.638	



Tabel T-C.33.
Rencana Akhir (Rankhir) Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2024 (Rp)	Keterangan			
				Hasil Program	Target (7)	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Target (11)			
						Tolak Ukur (6)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	Tolak Ukur (10)						
2.15.01	(2) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	(4) Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	(5) Dishub	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100%										
2.15.01.2.01	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Dishub			Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%								
	06 Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Dishub			Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	1 dok	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	1 dok						
						Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 lap	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 lap						
2.15.01.2.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100%								
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Dishub			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 org/bln	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 org/bln						
	05 Koordinasi dan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Dishub			Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun skpd	1 lap	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun skpd	1 lap						
2.15.01.2.03	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang	100%								

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	01 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Dishub			Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 lap	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1lap	2.000.000	2.500.000	Dishub	
2.15.01.2.05	4 Administrasi Kewenangan Perangkat Daerah					Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi	100%			150.000.000	180.000.000		
	02 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut Kelengkapannya	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Dishub			Jumlah Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	Jumlah Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	150.000.000	150.000.000	Dishub	kurang 40 jt
	03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Dishub			Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	2 org	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	2 org	0	30.000.000	Dishub	
2.15.01.2.06	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah					Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100%			333.925.000	307.500.000		
	01 Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Dishub			Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	4.001.000	4.500.000	Dishub	
	02 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Dishub			Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	110.000.000	30.000.000	Dishub	
	04 Penyediaan bahan logistik kantor	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Dishub			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	25.000.000	18.000.000	Dishub	
	05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Dishub			Jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	40.000.000	50.000.000	Dishub	
	06 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Dishub			Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dok	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dok	5.000.000	5.000.000	Dishub	
	09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Dishub			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	65 lap	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	75 lap	149.924.000	200.000.000	Dishub	

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.2.07	6 Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah					Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	100%			569.608.000	1.950.000.000		
	01 Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Dishub			Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	520.208.000	400.000.000	Dishub	
	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Dishub			Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 unit	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 unit	0	300.000.000	Dishub	
	03 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Dishub			Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 unit	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 unit	49.400.000	50.000.000	Dishub	
	04 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Dishub			Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya disediakan	2 unit	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya disediakan	0 unit	0	1.200.000.000	Dishub	
2.15.01.2.08	7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase ketersediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%			1.426.918.038	838.000.000		
	01 Penyediaan jasa surat menyurat	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Dishub			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	250 lap	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	250 lap	3.000.000	3.000.000	Dishub	
	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Dishub			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 lap	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 lap	63.799.638	45.000.000	Dishub	
	03 Penyediaan jasa peralatan kerja dan perlengkapan kantor	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Dishub			Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 lap	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	30.000.000	50.000.000	Dishub	
	04 Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	Dishub			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 lap	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 lap	1.330.118.400	740.000.000	Dishub	

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.2.09	8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%			275.090.000	248.000.000		
	01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Dishub			Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 unit	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	39.170.000	40.000.000	Dishub	
	02 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Dishub			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 unit	235.920.000	200.000.000	Dishub	
	06 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Dishub			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	0 unit	0	8.000.000	Dishub	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas di jalan raya	Dishub	Cukupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	Persentase ketersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	100%			930.843.600	5.620.000.000		
2.15.02.2.02.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					Jumlah prasarana jalan di jalan kab/kota yang terbangun	0 unit	Jumlah prasarana jalan di jalan kab/kota yang terbangun	0 unit	0	1.300.000.000	Dishub	
	01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										200.000.000	Dishub	
	02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					Jumlah perlengkapan jalan di jalan kab/kota yang tersedia	301 unit	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kab/kota yang tersedia	115 unit	405.000.000	300.000.000	Dishub	
	03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	Dishub			Jumlah prasarana jalan yang terhabilitasi dan terpelihara	2 unit	Jumlah prasarana jalan yang terhabilitasi dan terpelihara	2 unit	0	150.000.000	Dishub	
	04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	Dishub			Jumlah perlengkapan jalan yang terhabilitasi dan terpelihara	1 lokasi	Jumlah perlengkapan jalan yang terhabilitasi dan terpelihara	1 lokasi	60.000.000	650.000.000	Dishub	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.2.03	3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					Persentase ketersediaan terminal penumpang tipe c	100%				0	2.000.000.000	Dishub
	02	Pembangunan gedung terminal	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	Dishub			Jumlah gedung terminal yang terbangun	0 unit	Jumlah gedung terminal yang terbangun	0 unit		0	1.500.000.000	Dishub
	03	Pengembangan sarana dan prasarana terminal	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	Dishub			Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dilakukan pengembangan	0 unit	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dilakukan pengembangan	0 unit		0	300.000.000	Dishub
	04	Rehabilitas dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	Dishub			Jumlah terminal yang terpelihara	0 unit	Jumlah terminal yang terpelihara	0 unit		0	200.000.000	Dishub
2.15.02.2.05	4	Pengujian berkala kendaraan bermotor					Persentase ketersediaan sarana prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	100%				0	1.520.000.000	Dishub
	01	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	Dishub			Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	0 unit	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	0 unit		0	1.500.000.000	Dishub
	02	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	Dishub			Jumlah sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya	0 org	Jumlah sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya	0 org		0	20.000.000	Dishub
2.15.02.2.06	5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					Persentase terlaksananya manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100%			465.843.600		730.000.000	Dishub
	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kota - Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	Dishub			Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota	11 lap	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota	11 lap	465.843.600		500.000.000	Dishub

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	05 Forum lalu lintas dan angkutan jalan kab/kota	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	Dishub			Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan kab/kota	0 lap	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan kab/kota	0 lap	0	230.000.000	Dishub	
2.15.02.2	6 Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota					Persentase tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang	100%			0	20.000.000	Dishub	
	02 Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kab/kota	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	Dishub			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kab/kota	0 lap	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kab/kota	0 lap	0	20.000.000	Dishub	
2.15.02.2.11	7 Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota					Persentase tersusunnya rencana umum jaringan trayek perkotaan	100%			0	50.000.000	Dishub	
	01 Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	Dishub			Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kab/kota	1 dok	Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kab/kota	1 dok	0	50.000.000	Dishub	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi	Dishub	Cakupan pengelolaan pelayaran	100%					100.000.000	510.000.000		
2.15.03.2.07	1 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota					Persentase pengawasan lintas penyeberangan angkutan sungai	100%			0	40.000.000		
	02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	Dishub			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kab/kota	0 lap	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kab/kota	0 lap	0	40.000.000	Dishub	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.03.2.13	2. Pembangunan dan pemberian izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau						Persentase pemberian izin dan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	100%			100.000.000	470.000.000		
	04. Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau		Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	Dishub			Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	0 lap	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	0 lap	0	20.000.000	Dishub	
	05. Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau		Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	Dishub			Jumlah fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau yang tersedia	5 unit	Jumlah fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau yang tersedia	5 unit	100.000.000	150.000.000	Dishub	
	06. Pembangunan dermaga sungai dan danau		Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	Dishub			Jumlah dermaga sungai dan danau yang dibangun	1 unit	Jumlah dermaga sungai dan danau yang dibangun	1 unit	0	300.000.000	Dishub	
	TOTAL										7.485.387.597	13.565.000.000		

